

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terkait dengan faktor-faktor seperti Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Saham Publik dan Kepatuhan Syariah yang dapat berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini, antara lain:

2.1.1 **Wardatul Baidok dan Dina Fitriasia Septiarini (2016)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, dewan pengawas syariah, frekuensi rapat dewan komisaris syariah, dan frekuensi rapat komite audit terhadap pengungkapan indeks *Islamic Social Reporting*. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pada bank umum syariah periode 2010-2014 sebanyak 12 bank umum syariah dengan menggunakan metode *purposive sampling* dalam pemilihan sampel sehingga total sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya 6 bank yang memenuhi kriteria pemilihan dengan 30 unit analisis.

Variabel yang digunakan yaitu variabel independen yang terdiri dari dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, dewan pengawas syariah, frekuensi rapat dewan komisaris syariah, dan frekuensi rapat komite audit, serta Variabel dependen yaitu tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

regresi data panel, koefisien determinasi (R^2), uji hipotesis yang meliputi uji F dan uji t. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting*. (2) Komposisi Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting*. (3) Dewan Pengawas Syariah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting*. (4) Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting*. (5) Frekuensi Rapat Komite Audit secara berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini:

- a. Menguji pengaruh dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, dewan pengawas syariah, frekuensi rapat dewan komisaris syariah, dan frekuensi rapat komite audit terhadap pengungkapan ISR
- b. Menggunakan variabel dependen yang sama yaitu *Islamic Social Reporting* (ISR) dan Menggunakan variabel independen yang sama yaitu dewan komisaris dan dewan pengawas syariah
- c. Menggunakan teknik analisis data yang sama yaitu regresi linier berganda

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini:

- a. Periode penelitian terdahulu 2010-2014 dengan total sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 6 Bank Umum Syariah, sedangkan

periode penelitian ini 2012-2016 dengan total sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 11 Bank Umum Syariah.

- b. Penelitian terdahulu menggunakan Variabel independen yaitu dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, dewan pengawas syariah, frekuensi rapat dewan komisaris syariah, dan frekuensi rapat komite audit, sedangkan dalam penelitian ini hanya menggunakan variabel independen dewan komisaris dan pengawas syariah dari penelitian tersebut.

2.1.2 Amanda K.M dan Agung Yulianto (2016)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari faktor pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah, Kepatuhan Syariah dan surat berharga syariah terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2010-2013 yang sebanyak 12 bank. Dengan menggunakan metode *purposive sampling* dalam pemilihan sampel. Jumlah total sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 8 Bank Umum Syariah dengan 32 unit analisis.

Variabel yang digunakan yaitu variabel independen yang terdiri dari penerbitan surat berharga, pelaksanaan tugas, tanggungjawab dewan pengawas syariah, dan tingkat pengungkapan, serta Variabel dependen yaitu tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data analisis deskriptif dan analisis statistik inferensial dengan menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini

menunjukkan bahwa penerbitan surat berharga syariah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada bank umum syariah di Indonesia. Sedangkan pada pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah dan kepatuhan syariah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada bank umum syariah di Indonesia.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini:

- a. Menguji pengaruh dari kepatuhan syariah terhadap pengungkapan ISR
- b. Menggunakan variabel dependen pengungkapan ISR dan variabel Independen yaitu kepatuhan syariah.
- c. Menggunakan sampel yang sama yaitu dari perusahaan yang terdaftar di Bank Umum Syariah di Indonesia
- d. Menggunakan teknik analisis data regresi linier berganda

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini:

- a. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen yaitu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah, Kepatuhan Syariah dan surat berharga syariah, sedangkan dalam penelitian ini hanya menggunakan variabel independen kepatuhan syariah dari penelitian tersebut.
- a. Periode penelitian dalam penelitian terdahulu menggunakan sampel Bank Umum Syariah pada tahun 2010-2014, sedangkan periode penelitian ini menggunakan Bank Umum Syariah pada tahun 2012-2016

2.1.3 Awalya Ma'rifatul Jannah, Asrori (2016)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh atas *Good Corporate Governance* (GCG), *size*, jenis produk dan kepemilikan saham publik terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan yang terdaftar di Daftar Efek Syariah selama periode tahun 2011-2014 dengan menggunakan metode *purposive sampling* dalam pemilihan sampel. Jumlah Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 54 perusahaan.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel independe yang terdiri dari *Good Corporate Governance* (GCG), *size*, jenis produk, dan kepemilikan saham publik serta variabel dependen yaitu pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Teknik analisis data yang digunakan dilakukan peneliti yaitu dengan statistik deskriptif dan uji asumsi klasik sertapengujian hipotesis dengan metode regresi berganda. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa *size* dan jenis produk berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR, Sedangkan GCG dan kepemilikan saham publik tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini:

- e. Menguji pengaruh dari GCG dan kepemilikan saham publik terhadap pengungkapan ISR
- f. Menggunakan variabel dependen pengungkapan ISR dan variabel Independen yaitu GCG yang diproksikan dengan Ukuran Dewan Komisaris serta Kepemilikan Saham Publik.

- g. Menggunakan teknik analisis data regresi linier berganda

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini:

- a. Periode dalam penelitian terdahulu menggunakan tahun 2011-2014, sedangkan periode dalam penelitian ini yaitu 2012-2016
- b. Penelitian terdahulu menggunakan sampel dari perusahaan yang terdaftar di daftar efek syariah, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel dari perbankan yang terdaftar di bank umum syariah di Indonesia.

2.1.4 Santi Lestari (2016)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh atas profitabilitas, likuiditas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank syariah di Indonesia yang tercantum dalam Bank Umum Syariah pada periode 2010-2014 dengan menggunakan metode *Purposive Sampling* untuk pemilihan sampel. Jumlah total sampel yang digunakan yaitu 8 perusahaan dari Bank Umum Syariah.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel independen yang terdiri dari profitabilitas, likuiditas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan serta variabel dependen yaitu pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis uji hipotesis dengan beberapa regresi linear. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas, likuiditas, *leverage* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Sedangkan,

umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini:

- a. Menguji pengaruh dari ukuran perusahaan terhadap pengungkapan ISR
- b. Menggunakan variabel dependen yaitu pengungkapan *Islamic Social Reporting* dan variabel independe yaitu ukuran perusahaan.
- c. Menggunakan teknik analisis data yaitu regresi linier berganda

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini:

- b. Periode dalam penelitian terdahulu yaitu tahun 2010-2014 dengan total sampel yang digunakan sebanyak 8 Bank Umum Syariah, sedangkan periode dalam penelitian ini yaitu tahun 2012-2016 dengan total sampel yang digunakan sebanyak 11 Bank umum Syariah.
- c. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen yaitu Profitabilitas, likuiditas, *leverage* dan umur perusahaan, sedangkan dalam penelitian ini hanya menggunakan variabel independen ukuran perusahaan dari penelitian tersebut.

2.1.5 Zayyinatul Khasanah dan Agung Yulianto (2015)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari *Investment Account Holders*, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dan kepatuhan syariah terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank syariah di Indonesia yang tercantum dalam Bank Umum Syariah pada periode 2010-2013 dengan menggunakan

metode *Purposive Sampling* untuk pemilihan sampel. Jumlah total sampel yang digunakan yaitu 8 perusahaan dari Bank Umum Syariah.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel independen yang terdiri dari *Investment Account Holders*, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dan kepatuhan syariah serta variabel dependen yaitu pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*. Teknik Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensial dengan menggunakan pengujian hipotesis dengan regresi linear. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Investment Account Holders* dan kepatuhan syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*. Sedangkan, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah tidak dapat berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*.
Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini:

- a. Menguji pengaruh dari Kepatuhan syariah terhadap pengungkapan ISR.
- b. Menggunakan variabel dependen yaitu pengungkapan *Islamic social Reporting* dan variabel independen yaitu kepatuhan syariah.
- c. Menggunakan sampel yang sama yaitu dari perusahaan yang terdaftar di Bank Umum Syariah di Indonesia.
- d. Menggunakan teknik analisis data regresi linier berganda.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini:

- a. Periode penelitian terdahulu 2010-2013, sedangkan periode penelitian ini 2012-2016.

- b. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen yaitu *Investment Account Holders*, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dan kepatuhan syariah, sedangkan dalam penelitian ini hanya menggunakan variabel independen kepatuhan syariah dari penelitian tersebut.

2.1.6 Lakharis Inuzula, Hasan Basri, dan Shabri (2015)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dewan pengawas syariah, peran dewan komisaris, dan pengaruh ukuran bank tingkat *Islamic Social Reporting (ISR)*. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bank Umum Syariah (BUS) dengan periode 2010-2013 dan sampel dipilih dengan menggunakan metode *unbalanced panel data* sehingga total bank yang digunakan sebanyak 11 bank dengan 42 data.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel independen yang terdiri dari ukuran perusahaan, profitabilitas dan kinerja lingkungan, serta variabel dependen yaitu *Islamic Social Reporting (ISR)*. Teknik analisis data pada penelitian ini dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dewan pengawas syariah, peran dewan komisaris, dan pengaruh ukuran bank dapat berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting (ISR)* perusahaan syariah di Bank Umum Syariah.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini:

- a. Menguji pengaruh dari peran dewan pengawas syariah, peran dewan komisaris, dan pengaruh ukuran bank terhadap pengungkapan ISR.

- b. Menggunakan variabel dependen yaitu pengungkapan ISR dan variabel independen yaitu dewan komisaris, dewan pengawas syariah dan ukuran bank
- c. Menggunakan teknik analisis data regresi linier berganda

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini:

- a. Periode dalam penelitian terdahulu yaitu 2010-2013, sedangkan periode dalam penelitian ini yaitu 2012-2016
- b. Sampel yang digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu bank syariah di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan bank Umum Syariah di Indonesia.

2.1.7 Amirul Khoirudin (2013)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari elemen *Good Corporate Governance* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* pada perbankan syariah di Indonesia. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah di Indonesia dengan metode *purposive sampling* untuk pemilihan sampel. Jumlah total sampel yang diuji sebanyak 10 bank umum syariah

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel independen yang terdiri dari ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan pengawas syariah, serta variabel dependen yaitu pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensial. Hasilnya menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris dapat berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic*

social Reporting (ISR) pada perbankan syariah di Indonesia, Sedangkan ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic social reporting* pada perbankan syariah di Indonesia.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini:

- a. Menguji pengaruh dari elemen GCG yang diproksikan dengan ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan ISR
- b. Menggunakan variabel dependen yaitu pengungkapan *Islamic Social Reporting* dan variabel independen yaitu ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan pengawas syariah

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini:

- a. Periode dalam penelitian terdahulu yaitu 2010-2011, sedangkan periode dalam penelitian ini 2012-2016
- b. Teknik analisis data dalam penelitian terdahulu menggunakan teknis analisis deskriptif dan analisis inferensial, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi linier berganda.

2.1.8 Ratna A.N, Fachrurrozie, Prabowo Y.J. (2013)

Penelitian ini bertujuan adalah untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan, kepemilikan instutusional dan ukuran dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Sampel dipilih menggunakan metode *purpossive sampling* dan diperoleh 24 pengamatan. Data dikumpulkan dari perusahaan perbankan syariah yang ada di Indonesia pada tahun 2010-2012.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel independen yang terdiri dari kinerja keuangan, kepemilikan institusional dan ukuran dewan pengawas syariah serta variabel dependen yaitu pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Teknik Analisis data penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik, analisis deskriptif, dan regresi ordinary least square (OLS). Hasil dari penelitian menunjukkan secara simultan kinerja keuangan, kepemilikan institusional dan ukuran dewan pengawas syariah dapat berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Tetapi pada uji parsial kepemilikan institusional dan ukuran dewan pengawas syariah dapat berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR), sedangkan variabel kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini:

- a. Menguji pengaruh dari GCG yang diproksikan dengan ukuran dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan ISR
- b. Menggunakan variabel dependen yaitu pengungkapan *Islamic Social Reporting* dan variabel independen yaitu ukuran dewan pengawas syariah

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini:

- a. Periode dalam penelitian terdahulu yaitu 2010-2012, sedangkan periode dalam penelitian ini yaitu 2012-2016.
- b. Teknik analisis data dalam penelitian terdahulu menggunakan uji asumsi klasik, uji deskriptif dan regresi *ordinary least square* (OLS), sedangkan

dalam penelitian ini hanya menggunakan teknik analisis uji deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda dan uji t.

- c. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen kinerja keuangan, kepemilikan manajerial dan ukuran dewan pengawas syariah, sedangkan dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan variabel independen ukuran dewan pengawas syariah dari penelitian tersebut.

2.1.9 Puji Lestari (2013)

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *Islamic Social Reporting* (ISR) Bank Syariah di Indonesia. Ada empat faktor yang diduga mempengaruhi ISR, yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, umur perusahaan, dan proporsi komisaris independen. Penelitian ini menggunakan sampel dengan menganalisis laporan tahunan dari 18 bank syariah periode 2010-2011.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel independen yang terdiri dari ukuran perusahaan, profitabilitas, umur perusahaan, dan proporsi komisaris independen serta variabel dependen yaitu *Islamic Social Reporting* (ISR). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi dan hasilnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas secara signifikan mempengaruhi tingkat ISR, tapi itu berlawanan untuk umur perusahaan dan proporsi komisaris independen.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini:

- a. Menguji pengaruh dari ukuran perusahaan terhadap pengungkapan ISR.

- b. Menggunakan variabel dependen yaitu pengungkapan ISR dan variabel independen yaitu ukuran perusahaan.
- c. Menggunakan teknik analisis data regresi linier berganda.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini:

- a. Periode dalam penelitian terdahulu yaitu 2010-2012, sedangkan periode dalam penelitian ini yaitu 2012-2016.
- b. Penelitian terdahulu menggunakan sampel dari bank syariah yang ada di Malaysia, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan sampel dari Bank umum Syariah yang terdaftar di Indonesia.
- c. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, umur perusahaan, dan proporsi komisaris independen, sedangkan dalam penelitian ini hanya menggunakan ukuran perusahaan dari penelitian tersebut.

2.1.10 Othman, R, Thani, Azlan Md, dan Ghani, Erlane K (2009)

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk memberikan pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Karakteristik perusahaan yang digunakan yaitu ukuran, profitabilitas, komposisi dewan dan jenis industri yang. populasi yang digunakan adalah Perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia yaitu Top 100 perusahaan pada periode 2004-2006. Jumlah total sampel akhir yang digunakan adalah 56 perusahaan.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel independen yang terdiri dari ukuran perusahaan, profitabilitas, komposisi dewan dan jenis

industri, serta variabel dependen yaitu pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu statistik deskriptif dan analisis linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga faktor yang dipilih: ukuran perusahaan, profitabilitas dan komposisi dewan secara signifikan dapat mempengaruhi perusahaan dalam pengungkapan *islamic social reporting*.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini:

- a. Menguji pengaruh dari ukuran perusahaan terhadap pengungkapan ISR
- b. Menggunakan variabel dependen yaitu pengungkapan ISR dan variabel independen yaitu ukuran perusahaan
- c. Menggunakan teknik analisis data regresi linier berganda

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini:

- a. Periode dalam penelitian terdahulu yaitu 2004-2006, sedangkan periode dalam penelitian ini yaitu 2012-2016
- b. Penelitian terdahulu menggunakan sampel dari perusahaan yang terdaftar di bursa Malaysia, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel dari perusahaan yang terdaftar di bank umum syariah di Indonesia
- c. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, komposisi dewan dan jenis industri, sedangkan dalam penelitian ini hanya menggunakan ukuran perusahaan dari penelitian tersebut.

Berdasarkan beberapa uraian diatas, berikut adalah tabel matriks untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya:

Tabel 2.1

Tabel Matriks (variabel dependen: Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR))

NAMA PENELITI	VARIABEL DEPENDEN				
	DK	DPS	UK	KSP	KS
Wardhatul (2016)	+	+			
Amanda dkk (2016)					-
Awalya (2016)	-		+	-	
Santi (2016)			-		
Zayyinatul dkk (2015)					+
Lakhariz (2015)	+	+			
Amirul (2013)	+	-			
Ratna dkk (2013)		+			
Puji (2013)			+		
Otman dkk (2009)			+		

Sumber data diolah (2016)

Keterangan :

- + = berpengaruh
- = Tidak berpegaruh

2.2 Landasan Teori

Pada sub bab ini, akan diuraikan teori-teori yang melandasi dan mendukung penelitian ini. Berikut adalah teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini :

2.2.1 Teori Legitimasi

Legitimasi merupakan suatu teori yang memberikan penjelasan bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas akan dilakukan sesuai sistem norma, nilai, kepercayaan dan definisi yang telah dikembangkan secara sosial (Suchman, 1995). Gray *et al* (1996) juga berpendapat bahwa Legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (*society*), pemerintah individu dan kelompok masyarakat. Hal tersebut berarti perusahaan harus menjalankan semua kegiatan operasionalnya harus dilakukan sesuai dengan harapan masyarakat karena legitimasi masyarakat merupakan faktor yang strategis dalam keberlangsungan suatu perusahaan di masa depan.

Dalam teori legitimasi ini, sebuah perusahaan akan melakukan penerapan konsep CSR karena banyaknya tekanan sosial, politik dan ekonomi dari luar perusahaan, sehingga perusahaan tersebut akan cenderung melaksanakan penyeimbang dengan melakukan hal-hal yang telah diharuskan dalam peraturan yang telah ditetapkan dan melakukan apa yang berdampak baik bagi lingkungan di sekitarnya. Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan akan berusaha secara terus-menerus dan berkelanjutan untuk bertindak sesuai dengan batasan-batasan atau norma-norma yang ada di masyarakat sekitar. Atas usahanya tersebut perusahaan berusaha agar aktivitasnya diterima menurut persepsi pihak eksternal (Deegan, 2000).

Teori ini berkaitan erat dengan tujuan dari ISR, dimana informasi yang diungkapkan atau dipublikasikan tidak hanya memuat informasi mengenai kinerja

keuangan perusahaan, tetapi juga harus meliputi informasi tentang segala aktivitas sosial dan lingkungan yang memungkinkan perusahaan bisa tumbuh berkesinambungan dengan masyarakat. Sebuah perusahaan melegitimasi keberadaannya dalam masyarakat jika dalam operasi dan kegiatannya terlihat mengikuti/menganut norma-norma yang telah disetujui oleh masyarakat. Sebaliknya, Jika suatu perusahaan dipandang belum mengikuti/menganut norma-norma sosial yang diharapkan dalam operasinya, maka akan timbul suatu kesenjangan legitimasi antara operasi perusahaan dan harapan masyarakat sekitar. Perusahaan bisa melegitimasi operasi mereka dengan memiliki praktik CSR yang baik.

2.2.2 *Islamic Social Reporting (ISR)*

Islamic Social Reporting (ISR) merupakan suatu perluasan dari pelaporan sosial yang tidak hanya berupa keinginan besar dari seluruh masyarakat terhadap peranan perusahaan dalam ekonomi melainkan juga berkaitan dengan perspektif spiritual (Haniffa, 2002). *Islamic Social Reporting (ISR)* adalah pengungkapan tanggung jawab sosial secara islami pada perusahaan yang bersifat sukarela (*voluntary disclosure*). Indeks ini menekankan pada keadilan sosial terkait dengan lingkungan, hak minoritas dan karyawan (Fitria dan Hartanti, 2010). Menurut Husai dan Rania (2010) menyatakan bahwa penerapan tanggung jawab sosial dalam sistem keuangan harus dilakukan karena masyarakat atau nasabah berhak untuk mengetahui segala informasi mengenai seluruh aktivitas suatu perusahaan.

ISR lahir dan dikembangkan dengan dasar dari standar pelaporan berdasarkan AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) yang kemudian dikembangkan oleh masing-masing peneliti selanjutnya. Menurut Maulida (2014) menjelaskan bahwa konsep *Islamic Social Reporting Index* ini merupakan suatu alat tolak ukur dalam penilaian pelaksanaan kinerja sosial di perbankan syariah. Index tersebut berisi item-item standart dari CSR diyakini sangat cocok digunakan karena dianggap sesuai dengan perspektif Islam. Adapun indeks *Islamic Social Reporting* (ISR) terdiri dari enam tema yang meliputi :

- a. Pendanaan dan Investasi (Finance & Investment), pengungkapan pada tema ini adalah praktik operasional yang mengandung *riba'*, *gharar* dan aktivitas pengelolaan zakat.
- b. Produk dan jasa, aspek yang perlu diungkapkan dalam tema ini adalah status kehalalan produk yang digunakan dan pelayanan atas keluhan konsumen yang tujuannya adalah agar pada pemangku kepentingan mengetahui barang atau jasa tersebut diperbolehkan atau dilarang dalam ajaran islam.
- c. Karyawan, konsep yang mendasari tema ini adalah etika amanah dan keadilan, sehingga karyawan harus diperlakukan dengan adil dan dibayar secara wajar serta harus memenuhi kebutuhan spritual mereka.
- d. Masyarakat, konsep yang mendasari tema ini adalah *ummah*, *amanah* dan *adl*, yang menekankan pada kepentingan saling berbagi dan saling

meringkankan beban masyarakat yang dapat dilakukan dengan sedekah, *wakaf* dan *qard*.

- e. Lingkungan, dalam hal ini perusahaan tidak mungkin menyebabkan kerugian secara langsung terhadap lingkungan, sehingga diharapkan bank-bank syariah turut serta berpartisipasi dalam melestarikan lingkungan dengan memberikan sumbangan atau dukungan atas kegiatan CSR. Oleh karena itu, bank syariah syariah harus melaporkan setiap sifat dan jumlah setiap sumbangan yang diberikan untuk melestarikan lingkungan, serta harus mengungkapkan apakah bank syariah telah membiayai proyek yang dapat menimbulkan kerugian dan kerusakan lingkungan.
- f. Tata Kelola Organisasi, tata kelola organisasi tidak dapat dipisahkan guna memastikan pengawasan kepatuhan syariah pada aspek syariah.

Sofyani *et al* (2012) menjelaskan bahwa Indeks *Islamic Social Reporting* (ISR) terdiri dari 43 item pengungkapan (data terlampir pada lampiran 7, index *Islamic Social Reporting*) yang tersusun dalam enam tema sesuai dengan penelitian dan Masing-masing item pengungkapan memiliki nilai 1 atau 0. Nilai 1 akan diberikan jika item pada *Islamic Social Reporting* (ISR) terdapat dalam data perusahaan dan nilai 0 jika perusahaan tersebut tidak menampilkan *Islamic Social Reporting* (ISR). Hasil tersebut kemudian dijumlahkan baik menurut masing-masing tema maupun secara keseluruhan dengan total maksimum 38 skor. Sehingga rumus yang digunakan untuk mengukur inder ISR yaitu:

$$\text{Disclosure Level} = \frac{\text{jumlah skor disclosure yang dipenuhi}}{\text{jumlah skor maksimum}}$$

2.2.3 Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan konsep *Good Corporate Governance* (GCG). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, Dewan Komisaris merupakan suatu mekanisme yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan mekanisme untuk memberikan petunjuk serta arahan pada pengelola perusahaan. Peraturan tersebut juga memuat aturan yang mewajibkan semua perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas memiliki paling sedikitnya 2 (dua) anggota Dewan Komisaris, sehingga jumlah Dewan Komisaris dalam tiap perusahaan akan berbeda-beda jumlahnya karena harus menyesuaikan dengan kompleksitas perusahaan.

Secara umum, Dewan Komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab dalam pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan karena mengingat adanya kepentingan manajemen untuk melakukan manajemen laba yang mungkin akan berdampak pada berkurangnya kepercayaan investor. Dewan Komisaris diperbolehkan mengakses informasi perusahaan untuk mengatasinya. Dewan Komisaris tidak memiliki otoritas dalam perusahaan, oleh karena itu dewan direksi mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan informasi terkait dengan perusahaan kepada Dewan Komisaris (Amirul, 2013).

Dewan komisaris adalah banyaknya jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan. sehingga pengukurannya dapat dilakukan dengan cara

menghitung jumlah anggota dewan komisaris perusahaan yang disebutkan atau ditampilkan dalam laporan tahunan perusahaan (Amirul, 2013).

2.2.4 Dewan Pengawas syariah

Dewan Pengawas Syariah merupakan jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah yang ada dalam suatu perusahaan (Amirul, 2013). Dewan Pengawas Syariah diukur dengan menghitung jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah yang ada pada perusahaan tersebut. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah diterapkan (Rustam, 2013).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan suatu komponen yang hanya dimiliki oleh perusahaan yang dijalankan sesuai dengan syariah Islam. Laporan yang dibuat Dewan Pengawas Syariah (DPS) biasanya digunakan untuk meyakinkan para *stakeholder* bahwa perusahaan telah menjalankan aktivitas operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah diterapkan. Dewan Pengawas Syariah (DPS) ini terdiri dari para ahli dalam bidang syariah yang bertanggung jawab untuk mengawasi aktivitas perbankan syariah agar patuh pada aturan dan prinsip-prinsip syariah yang telah diterapkan. Menurut Rahman dan Bukair (2013) terdapat lima atribut dalam dewan pengawas syariah dan kelima atribut tersebut menjadi indikator dewan pengawas syariah yaitu jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah, Keanggotaan Lintas, Kualifikasi Pendidikan Dewan Pengawas Syariah, Reputasi Anggota Dewan Pengawas Syariah dan Keahlian Dewan Pengawas Syariah. Amirul (2013) menyatakan bahwa dewan pengawas

syariah dapat diukur dengan menghitung jumlah anggota dewan pengawas syariah dalam suatu perusahaan.

Di Indonesia DPS bertanggung jawab ke pada DSN (Dewan Syariah Nasional) dan Bank Indonesia. DPS memegang peranan penting dalam proses pengawasan di bank syariah. Menurut DSN MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN MUI Masa Bhakti Th. 2000-2005 bahwa DSN memberikan tugas pada DPS untuk:

1. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah;
2. Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN;
3. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran;
4. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan DSN.

Dewan pengawas syariah adalah banyaknya jumlah anggota dewan pengawas syariah dalam suatu perusahaan. sehingga pengukurannya dapat dilakukan dengan cara menghitung jumlah anggota dewan pengawas syariah perusahaan yang disebutkan atau ditampilkan dalam laporan tahunan perusahaan (Amirul, 2013).

2.2.5 Ukuran Perusahaan

Maulida dkk (2014) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan adalah klasifikasi besar kecilnya suatu perusahaan. Pada umumnya perusahaan besar memiliki aktiva yang besar, penjualan besar, *skill* karyawan yang baik, sistem informasi yang canggih, jenis produk yang banyak, struktur kepemilikan lengkap, sehingga membutuhkan tingkat pengungkapan secara luas (Gusti dan ida, 2015). Perusahaan dengan ukuran yang besar biasanya memiliki aktivitas yang lebih

besar sehingga dapat menyebabkan dampak yang juga lebih besar dari perusahaan-perusahaan yang lebih kecil. Dalam hal tersebut, semakin besar ukuran suatu perusahaan maka modal terkait sumber daya dan dana yang akan lebih banyak mendapatkan perhatian dari para pemangku kepentingan (*Stakeholder*) maupun para pemakai informasi keuangan lainnya dalam menggunakan aset yang ada untuk digunakan dalam pengambilan keputusan (Putri dan Yuyeta, 2014).

Ratnasari (2011) menyatakan bahwa Ukuran perusahaan dapat diukur dengan menggunakan jumlah karyawan, nilai total aset dan volume penjualan. Namun, dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur dengan Total Aset yang ada di perusahaan karena total *asset* dapat menunjukkan jumlah kepemilikan *asset* yang dimiliki perusahaan yang dapat diperoleh dari total *asset* lancar dan *asset* tetap, sehingga total *Asset* tersebut dinilai lebih dapat mencerminkan besar kecilnya ukuran suatu perusahaan serta dapat mencerminkan kondisi perusahaan tersebut. Total Aset diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang kemudian di logaritma natural untuk menyamakan dengan variabel lainnya. Sehingga rumus untuk mengukur ukuran perusahaan dalam penelitian ini yaitu:

$$\text{Size} = \text{Ln} (\text{Total Asset})$$

2.2.6 Kepemilikan Saham Publik

Bernadeta (2012) menyatakan bahwa Kepemilikan saham publik adalah suatu proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik/masyarakat terhadap saham perusahaan. Publik sendiri merupakan individu atau institusi yang memiliki kepemilikan saham di bawah 5% yang berada di luar manajemen dan tidak

memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan. Kepemilikan saham oleh publik umumnya dapat bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan publik yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen, yang artinya bahwa semua aktivitas dan kondisi dalam perusahaan harus dilaporkan dan diketahui oleh publik sebagai salah satu bagian dari pemegang saham walaupun tingkat kepemilikan sahamnya berbeda-beda satu sama lain (faizal, 2004).

Perusahaan yang go public dituntut untuk lebih transparan mengungkap informasi yang memadai dan relevan dengan tujuan menciptakan pasar modal yang efisien. Proporsi saham yang dimiliki publik yang lebih besar, akan berakibat pengawasan dari publik lebih besar. Menurut (Badjuri, 2012), Perusahaan yang sahamnya banyak dimiliki oleh publik, menunjukkan perusahaan tersebut memiliki kredibilitas yang tinggi dimata masyarakat dalam memberikan imbalan yang layak dan dianggap mampu beroperasi terus menerus sehingga akan melakukan pengungkapan informasi sosial lebih luas. Selain itu, perusahaan dinilai memiliki tanggung jawab secara moral kepada masyarakat. Kepemilikan saham publik diukur dengan rasio jumlah saham yang dimiliki publik terhadap total saham secara keseluruhan. Besarnya saham publik/masyarakat diukur melalui rasio dari jumlah kepemilikan lembar saham yang dimiliki publik terhadap total keseluruhan saham perusahaan, sehingga rumus untuk mengukur kepemilikan saham publik dalam penelitian ini yaitu:

$$\text{Kepemilikan Saham Publik} = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham oleh Publik}}{\text{Total Keseluruhan Saham}}$$

2.2.7 Kepatuhan Syariah

Sukardi (2012) menyatakan bahwa kepatuhan syariah merupakan suatu bentuk pemenuhan seluruh prinsip syariah di dalam suatu lembaga dimana kepatuhan tersebut mengandung nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan atau peraturan-peraturan yang telah ditetapkan Bank Indonesia. Kepatuhan syariah tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dan wajib dipenuhi oleh semua lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha, sehingga segala kegiatan atau aktivitas perusahaan tersebut harus sesuai dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan.

Kepatuhan syariah diwujudkan sesuai peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa dalam perbankan syariah. *Self Assessment* digunakan sebagai paradigma dalam mengukur atau menilai kesehatan suatu perusahaan termasuk perbankan syariah. Berdasarkan surat edaran OJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang penilaian tingkat kesehatan bank untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip yang telah diatur oleh bank Indonesia, Terdapat 11 indikator atau komponen penilaian *Good Corporate Governance* pada *Self Assessment*. Indikator-indikator tersebut adalah pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dewan komisaris, pelaksanaan tugas dan tanggungjawab direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dewan pengawas syariah, penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan bank, penerapan fungsi audit intern, penerapan fungsi audit ekstern, batas maksimum

penyaluran dana, dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal. Penilaian kepatuhan syariah suatu perusahaan dapat diperoleh dengan melihat hasil *self assessment* yang dilakukan oleh masing-masing bank atas pelaksanaan *Good Corporate Governance* untuk indikator pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta dalam pelayanan jasa dalam perbankan syariah sehingga dapat menggambarkan apakah perusahaan tersebut telah menerapkan seluruh ketentuan, prinsip-prinsip atau peraturan-peraturan yang telah ditetapkan Bank Indonesia. Hasil *self assessment* tersebut kemudian akan ditetapkan peringkat atas masing-masing kriteria/indikator sebagai berikut :

1. Peringkat 1 : Bank melakukan penerapan *GCG* dengan sangat baik.
2. Peringkat 2 : Bank melakukan penerapan *GCG* dengan baik.
3. Peringkat 3 : Bank melakukan penerapan *GCG* dengan cukup baik.
4. Peringkat 4 : Bank melakukan penerapan *GCG* dengan kurang baik.
5. Peringkat 5 : Bank melakukan penerapan *GCG* dengan tidak baik.

Dalam penelitian ini, Pengukuran kepatuhan syariah dilakukan dengan melihat nilai komposit dari hasil *Self Assessment* atas pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa, hal tersebut karena hasil penilaian dari hasil *Self Assessment* ini dirasa dapat mencerminkan apakah perusahaan tersebut telah menerapkan prinsip-prinsip syariah khususnya yang berkaitan dengan dana nasabah. Penilaian tersebut menggunakan nilai komposit yang menunjukkan peringkat penilai *self assessment*

dari bank yang kemudian dikalikan 5%, sehingga rumus untuk mengukur kepatuhan syariah dalam penelitian ini yaitu:

$$\text{Kepatuhan Syariah} = \text{Nilai Komposit yang diperoleh} \times 5\%$$

2.2.8 Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan ISR

Secara umum, Dewan Komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab dalam pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Ukuran Dewan Komisaris merupakan suatu mekanisme yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan memberi petunjuk bagi perusahaan sehingga perusahaan dapat menjalankan kegiatan operasionalnya secara lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Semakin banyak anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan maka pengawasan yang dilakukan akan lebih efektif dan akan dapat lebih mengontrol manajemen perusahaan termasuk dalam pengungkapan tanggung jawab sosialnya. Hal ini sesuai dengan teori legitimasi, dimana dengan ukuran Dewan Komisaris yang besar maka dapat mendorong manajemen selaku pelaku operasi perusahaan untuk mengungkapkan *Islamic Social Reporting* (ISR) dalam menjalankan fungsi bank syariah untuk turut mengupayakan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat.

Amirul (2013) menyatakan ukuran dewan komisaris dapat berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR yang berarti banyaknya dewan komisaris dalam perusahaan akan berpengaruh terhadap kualitas pelaporan perusahaan dalam mengungkapkan tanggungjawab sosialnya. Hal tersebut karena semakin banyak anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan maka pengawasan yang dilakukan akan lebih ketat sehingga dapat meminimalisasi kecurangan dalam

perusahaan termasuk dalam informasi yang mungkin disembunyikan oleh manajemen. Dewan komisaris yang semakin banyak pun juga dapat lebih menekan kepala perusahaan sehingga tuntutan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan sesuai aturan-aturan yang telah ditetapkan pun juga akan semakin besar.

Apabila dikaitkan dengan pengungkapan *Islamic Social Reporting*, semakin banyak anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan, maka pengawasan yang dilakukan dan arahan yang diberikan bagi perusahaan akan lebih baik dan efektif, sehingga kualitas kinerja sosial serta kualitas pelaporan perusahaan juga akan lebih baik, luas dan transparan termasuk dalam hal pengungkapan *Islamic Social Reporting*. hal tersebut berarti, semakin banyak anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan maka pengungkapan yang dilakukan akan lebih baik, luas dan transparan, karena semakin efektifnya kinerja dewan komisaris dalam melakukan pengawasan dan memberikan arahan, sehingga perusahaan akan cenderung melakukan segala kegiatan operasionalnya sesuai dengan aturan yang berlaku serta sesuai dengan harapan masyarakat.

2.2.9 Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengungkapan ISR

DPS memegang peranan penting dalam proses pengawasan di bank syariah. DPS mempunyai peran dalam pengungkapan ISR perbankan syariah. Hal ini karena DPS mempunyai wewenang mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap prinsip syariah. Hal ini sesuai dengan teori legitimasi, dimana dengan adanya pengawasan yang semakin efektif maka manajemen dapat melakukan

operasi perusahaan sesuai dengan prinsip syariah sehingga sesuai dengan harapan masyarakat.

Ratna dkk (2013) menyatakan bahwa ukuran dewan pengawas syariah dapat berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Ini berarti semakin banyak dewan pengawas syariah dalam suatu perusahaan maka semakin efektif pengawasan yang dapat dilakukan terhadap kinerja perusahaan, sehingga tekanan bagi perusahaan dalam melakukan kegiatan operasional sesuai dengan prinsip-prinsip syariah juga akan semakin besar. Semakin baik kinerja suatu perusahaan dalam memenuhi prinsip syariah, maka perusahaan tersebut akan cenderung melakukan segala kegiatannya dengan lebih baik, sehingga kualitas kinerja sosial dan kinerja pelaporan perusahaan juga akan lebih baik juga. Hal tersebut berarti, semakin banyak anggota dewan pengawas syariah dalam suatu perusahaan, maka pengungkapan tanggung jawab yang akan diungkapkan akan lebih luas dan transparan yang disebabkan karena semakin efektifnya kinerja dewan pengawas syariah dalam melakukan pengawasan dan memberikan saran serta nasehat, sehingga perusahaan akan cenderung melakukan segala kegiatan operasionalnya sesuai dengan aturan yang berlaku serta sesuai dengan harapan masyarakat.

2.2.10 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan ISR

Ukuran perusahaan merupakan suatu klasifikasi besar kecilnya suatu perusahaan yang diprosikan dengan total aset karena dinilai lebih dapat mencerminkan kondisi perusahaan. Perusahaan yang lebih besar melakukan aktivitas yang lebih banyak sehingga menyebabkan dampak yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan teori legitimasi, dimana perusahaan besar akan cenderung

memiliki aktivitas yang lebih banyak dan mungkin dapat menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya sehingga lebih banyak tekanan untuk lebih transparan dalam pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) dibandingkan perusahaan dengan ukuran yang kecil, maka perusahaan harus bisa mengidentifikasi aktivitas-aktivitas tersebut agar dapat menghindari dampak atau kerugian serta dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitarnya.

Puji Lestari (2013) menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat berpengaruh terhadap pengungkapan ISR yang berarti semakin besar perusahaan maka semakin banyak informasi yang harus diungkapkan termasuk tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Hal tersebut karena Semakin besar ukuran suatu perusahaan biasanya aktivitas yang dilakukan akan lebih banyak dan kompleks, sehingga memiliki dampak yang lebih besar pula terhadap lingkungan dan masyarakat disekitarnya. Hal ini tentu akan menimbulkan tuntutan bagi perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosialnya terhadap lingkungan dan masyarakat disekitarnya. Ukuran perusahaan yang besar juga biasanya mendapatkan lebih banyak perhatian dari publik karena terkait dengan sumber daya dan dana yang dikelola perusahaan, sehingga perusahaan akan lebih dituntut untuk mengungkapkan informasi yang lebih banyak termasuk informasi-informasi yang berisi tanggung jawab sosialnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka informasi yang akan dibutuhkan oleh masyarakat terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan termasuk pengungkapan *Islamic social Reporting* juga akan semakin banyak, sehingga

perusahaan tentu akan berusaha untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosialnya secara lebih baik lagi dan sesuai dengan harapan masyarakat.

2.2.11 Pengaruh Kepemilikan Saham Publik terhadap Pengungkapan ISR

Kepemilikan saham publik adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik/masyarakat terhadap saham perusahaan, Dimana proporsi kepemilikan publik tersebut juga mempunyai hak suara yang dapat berpengaruh secara langsung pada perusahaan termasuk keputusan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori Legitimasi, dimana perusahaan yang sahamnya dimiliki publik maka akan semakin banyak informasi yang dibutuhkan oleh publik, sehingga akan semakin besar pula tuntutan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosialnya sesuai keinginan masyarakat yang kemudian akan dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan lingkungan dan masyarakat sekitar.

Awalya (2016) menjelaskan bahwa kepemilikan saham publik tidak dapat berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Berarti banyaknya pemegang saham oleh publik tidak akan berpengaruh apapun terhadap keputusan perusahaan. Tetapi dalam teori *stakeholder* disebutkan bahwa kepemilikan saham oleh publik memiliki hak suara yang juga dapat memberikan pengaruh secara langsung terhadap perusahaan. Sehingga semakin besar proporsi kepemilikan saham oleh publik maka akan semakin besar pula informasi yang dibutuhkan. Hal tersebut karena para pemegang saham biasanya akan lebih banyak menuntut informasi yang lebih lengkap dan transparan sehingga masyarakat dapat mengawasi aktivitas manajemen perusahaann. Dengan demikian, berarti dapat

dikatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan saham oleh publik, maka informasi yang akan diungkapkan juga akan lebih banyak, sehingga perusahaan akan cenderung dituntut untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosialnya termasuk pengungkapan *Islamic Social Reporting* secara lebih baik dan transparan sesuai aturan yang berlaku serta sesuai dengan harapan masyarakat.

2.2.12 Pengaruh Kepatuhan Syariah terhadap Pengungkapan ISR

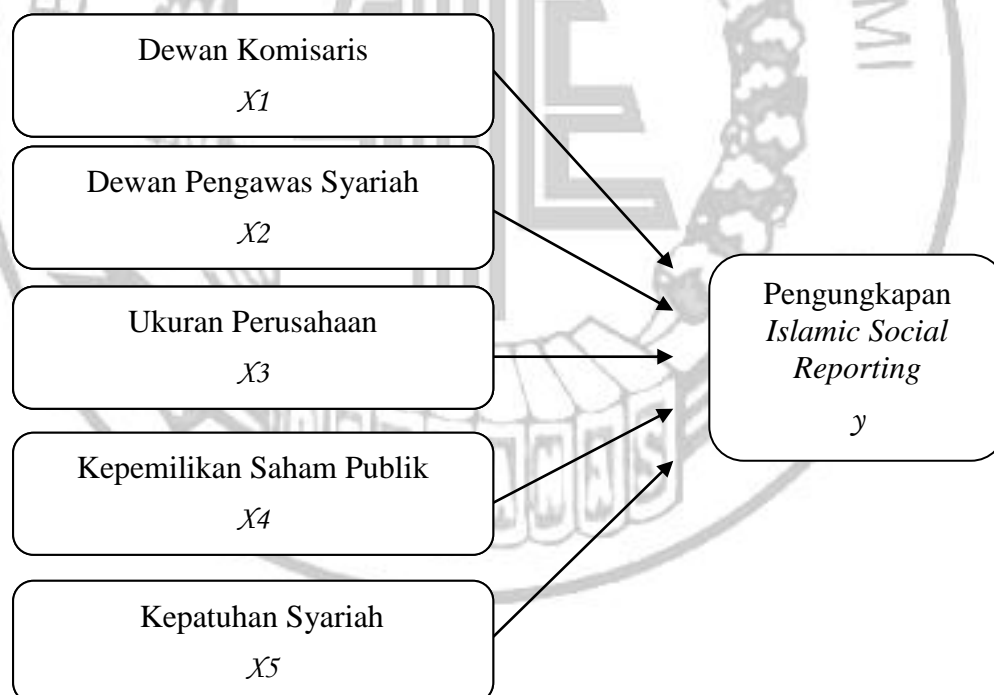
Kepatuhan syariah dapat diartikan sebagai bentuk pemenuhan seluruh prinsip syariah di dalam suatu lembaga dimana kepatuhan tersebut mengandung nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan atau peraturan-peraturan yang telah ditetapkan Bank Indonesia. Hal ini sesuai dengan teori legitimasi, dimana perusahaan akan cenderung mematuhi dan menjalankan segala kegiatan operasionalnya sesuai dengan peraturan-peraturan atau prinsip yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, sehingga memiliki citra yang baik di masyarakat.

Zayyinatul (2016) menjelaskan bahwa kepatuhan syariah dapat berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Hal ini berarti semakin baik perusahaan dalam menerapkan kepatuhan syariah maka perusahaan tersebut akan berusaha untuk menjalankan segala kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip dan aturan yang terkandung dalam syariat Islam termasuk dalam pengungkapan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semakin baik penerapan kepatuhan syariah dalam perusahaan maka perusahaan tersebut akan cenderung melakukan kegiatan operasionalnya sesuai prinsip syariah yang berlaku termasuk dalam mengungkapkan informasi-informasi terkait dengan perusahaan

seperti pengungkapan *Iskamic Social Reporting* yang dibutuhkan masyarakat, sehingga akan lebih dalam menjalankan kepatuhan syariah dan dapat sesuai dengan harapan masyarakat

2.3 Kerangka pemikiran

Gambar 2.1 mengilustrasikan kerangka yang akan mendukung dalam penelitian ini. Kerangka pemikiran ini akan menjelaskan lima faktor perusahaan yang berpengaruh untuk mengungkapkan ISR. Kelima faktor tersebut antara lain *Good Corporate Governance* yang meliputi ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan pengawas syariah, ukuran perusahaan, kepemilikan saham publik dan Kepatuhan Syariah.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu serta pembahasan dan landasan teori yang ada, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis:

H1 : Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

H2: Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

H3 : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

H4 : Kepemilikan saham publik berpengaruh terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

H5 : Kepatuhan Syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

